

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG ANGGOTA PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM

Yulia Rantika, Husni Syahrudin, Okianna

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN Pontianak

Email: yuliarantika@gmail.com

Abstract

The study aims to determine the Receivables Internal Control System Members In the Business Unit Primary Savings and Loans Cooperative of West Kalimantan Regional Police. This study is a descriptive evaluative research .. Data analysis in this research using descriptive analysis. In this study, data were collected through the method of documentation and interviews. The results showed that the Internal Control Member Receivables In the Business Unit Primary Savings and Loans Cooperative of West Kalimantan Regional Police are in good enough category, it can be seen from the cooperative's ability to exercise control. From the analysis obtained through interviews with the chairman of the cooperative (board) cooperatives showed that: The procedures and requirements set by the cooperative in accordance with the provision of ART (Bylaws) as set out in the Annual Members Meeting (RAT). That every member who wants to borrow must meet predetermined requirements. This is to prevent unwanted things in the future.

Keyword : Internal Control Systems, Accounts Receivable.

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi didirikan dari, oleh, dan untuk anggota, karena itu anggota koperasi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan atas dasar kesamaan hak dan kesamaan kewajiban.

Dalam pengembangannya, koperasi juga diikuti dengan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Dengan bertambah besarnya skala operasi serta semakin berkembangnya koperasi baik kegiatan maupun jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan tidak dapat lagi melaksanakan sendiri semua fungsinya, kondisi semacam ini menuntut pimpinan koperasi untuk mendelegasikan sebagian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada beberapa bawahan yang

dipimpinnya guna membantu pengelolaan perusahaan. Selain itu pimpinan koperasi juga membutuhkan suatu alat untuk mengawasi jalannya tugas yang dipercayakan kepada bawahan serta untuk mengetahui kemajuan yang akan dicapai koperasi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih dikenal dengan sistem pengendalian internal. Suatu koperasi menerapkan sistem pengendalian internal sebagai penunjang dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan bentuk perusahaan yang berbeda-beda. Menurut Mulyadi (2001:163) Sistem pengendalian internal yaitu “suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik terhadap struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan atau koperasi, seperti pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan.

Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang merupakan salah satu jenis koperasi serba usaha yang menaungi beberapa unit usaha dikelola oleh koperasi, baik usaha konsumsi yang menyediakan barang-barang untuk dikonsumsi yang dibutuhkan anggota seperti sembako, ATK dan lainnya hingga usaha simpan pinjam. Pemasaran barang-barang koperasi dilakukan melalui koperasi secara langsung kepada anggota koperasi. Unit-unit usaha inilah yang melayani anggota koperasi dilingkungan Mapolda Kalbar maupun melayani masyarakat umum. Unit usaha yang ditangani oleh Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yaitu: 1. Unit Usaha Simpan Pinjam, 2. Unit Usaha Perkreditan Barang, 3. Unit Usaha Waserda, 4. Unit Usaha Sekolah mengemudi, 5. Unit Usaha Kantin, 6. Unit Usaha Angkutan Umum. Secara umum semua unit usaha Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melayani anggota maupun non anggota. Namun empat dari unit usaha Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Perkreditan Barang, Unit Usaha Waserda dan Unit Usaha Kantin yang lebih utama dalam melayani anggota, sedangkan dua unit usaha lainnya yaitu Unit Usaha Sekolah Mengemudi dan Unit Usaha Angkutan Umum Lebih banyak melayani masyarakat umum.

Pada unit usaha simpan pinjam yang melayani anggota dalam bentuk simpanan dan pinjaman dana, koperasi memerlukan pengendalian internal dalam menangani setiap anggotanya yang melakukan transaksi pinjaman, sehingga piutang anggota terkendali oleh koperasi, peran pengurus di sini sangatlah penting dalam proses pemberian pinjaman. Bagi koperasi, analisis keuangan membantu dalam perencanaan langkah kebijaksanaan yang tepat dan sangat membantu dalam perencanaan koperasi. Untuk menilai kinerja keuangan atau prestasi koperasi data keuangan perlu dianalisis, analisis keuangan memerlukan tolak ukur yang dapat dipakai untuk membantu analisis tersebut. Penilaian kondisi keuangan koperasi secara internal digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya kondisi keuangan koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Atas dasar uraian tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Polisi Daerah Kalimantan Barat”. Adapun permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi permasalahan utamanya adalah “Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat?”.

Mengingat masalah yang dikemukakan masih bersifat umum, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Adapun sub-sub masalahnya

adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Lingkungan pengendalian (*Control Environment*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat? 2) Bagaimana Penilaian resiko (*risk assessment*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat? 3) Bagaimana Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat? 4) Bagaimana Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat? 5) Bagaimana Pemantauan (*Monitoring*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat?.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan masalah sub-sub masalah adalah sebagai berikut untuk mengetahui: 1) Lingkungan pengendalian (*Control Environment*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 2) Penilaian resiko (*risk assessment*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 3) Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 4) Informasi dan komunikasi (*Information and*

Communication) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 5) Pemantauan (*Monitoring*) dalam Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkometen sebagai berikut: Bagi Koperasi: Sebagai pengambilan keputusan dalam Sistem Pengendalian Internal piutang pada usaha simpan pinjam koperasi, sehingga informasi atau laporan yang dihasilkan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bagi Penulis:

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam Sistem Pengendalian Internal Koperasi. Bagi Universitas. Sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan dan referensi bagi mahasiswa/i yang akan menyusun Tugas Akhir. Untuk memperjelas batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini perlu ditetapkan variabel penelitian dan definisi operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dengan sub fokus sebagai berikut: Lingkungan pengendalian (*Control Environment*) , Penilaian resiko (*risk assessment*) . Aktivitas pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) , Pemantauan (*Monitoring*).

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran atau persepsi yang berbeda-beda mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara

pembaca dengan penulis, maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan tersebut ke dalam definisi operasional sebagai berikut: Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting . sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Jadi pengendalian internal piutang dalam penelitian ini adalah pada hakekatnya untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data dan pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada. Adapun pertimbangan atas pengendalian internal menyebutkan ada lima unsur yaitu: Lingkungan pengendalian Koperasi mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen kekeluargaan dalam Koperasi) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

Jadi lingkungan pengendalian dalam penelitian ini mencakup sikap para manajemen dan karyawan koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi Koperasi. Penilaian resiko (*risk assessment*). Semua organisasi memiliki risiko termasuk Koperasi, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti

ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

Jadi yang dimaksud dengan penilaian resiko dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan di Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam Pengendalian Internal Piutang

Aktivitas pengendalian untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan koperasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Jadi yang dimaksud Aktivitas pengendalian dalam penelitian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko pengendalian internal piutang. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern koperasi. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Jadi yang dimaksud informasi dan komunikasi dalam penelitian ini adalah menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal khususnya dalam pengendalian piutang. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern piutang akan menemukan kekurangan serta

meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku anggota atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada koperasi, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern.

Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Selain perannya dalam memantau pengendalian internal entitas, staf audit internal yang memadai juga dapat mengurangi biaya audit eksternal dengan memberikan bantuan langsung kepada audit eksternal.

Jadi yang dimaksud dengan pemantauan didalam penelitian ini adalah pemantauan yang dilakukan Koperasi dalam hal pengendalian piutang yang ada dan terdapat di Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Piutang tak tertagih adalah Kerugian pendapatan, yang memerlukan pencatatan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena penjualan secara kredit, yang merupakan kerugian bagi

kreditur. Jadi dapat disimpulkan, bahwa piutang tak tertagih dalam penelitian ini adalah tagihan (klaim) kepada pihak ketiga berupa uang, barang atau jasa dari koperasi operasional dan bukan merupakan barang yang dititipkan, yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

METODE

Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah, terutama dalam penelitian ini adalah dalam bidang pendidikan. Menurut Sugiyono (2012:6) :Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif. Menurut Usman Rianse dan Abdi (2008:30), “Metode penelitian Deskriptif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian”. Jadi metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Polisi Daerah Kalimantan Barat. Adapun bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah survey (*Survey Studies*), yang bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Polisi Daerah Kalimantan Barat. Penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :Teknik komunikasi langsung,

Teknik Studi Dokumenter. Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah: Pedoman Wawancara yaitu daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada sumber data, yaitu Ketua Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Buku catatan digunakan untuk mencatat data-data yang berkenaan dengan penelitian ini yang ada dalam arsip, buku-buku atau dokumen. Agar mempermudah peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti antara lain: Mengumpulkan data melalui wawancara, dan catatan-catatan/dokumen, mengolah dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berada dalam kategori cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam melakukan pengendalian. Dari analisis yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua koperasi (pengurus) koperasi menunjukkan bahwa: Prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahwa setiap anggota yang ingin meminjam harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tunggakan anggota pada Unit Usaha Simpan Pinjam yaitu 1) Adanya anggota yang PTDH, DPO dan Pensiun Dini. 2) Adanya permohonan pinjaman yang tidak diketahui Kaurkeu dan Kasatkernya. 3) Terdapat beberapa Kaurkeu

yang tidak segera menginformasikan kepada Pengurus Koperasi yaitu : a. Anggota bermasalah yang sedang proses Sidang Disiplin dan Kode Etik. b. Anggota yang sedang mempersiapkan Masa Pensiun / akan pensiun Dini. c. Anggota yang tidak mempunyai Gaji/Tunjangan Kinerja (Dalam permohonan Pinjaman Slip gajinya tercantum). 4. Terdapat Kaurkeu yang tidak mau membantu penagihan ataupun pemotongan Gaji anggota yang sedang dalam masa putusan Sidang Kode Etik Polri berupa rekomendasi PTDH sementara gaji tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pembahasan

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil pengendalian internal yang telah dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara antara penulis dengan Ketua dan bendahara koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, penulis menemukan Sistem pengendalian internal piutang yang terdapat pada koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: Secara Umum: Koperasi menggunakan formulir permohonan pinjaman dari calon peminjam untuk proses pemberian kredit. Formulir permohonan pinjaman harus disetujui oleh pejabat koperasi yang berwenang mengenai jumlah kredit yang diminta, syarat kredit, dan syarat lainnya. Semua dokumen yang mendukung transaksi pemberian kredit telah: Menggunakan nomor aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang mengotorisasi dokumen tersebut. Tanda bukti slip tercantum dengan jelas sesuai dengan kebutuhan dokumen yang diperlukan, sehingga lebih mudah untuk pengidentifikasian. Tembusan dari setiap tanda bukti slip yang telah diotorisasi memiliki warna yang berbeda-beda sehingga memudahkan dalam proses pengerjaannya karena memiliki warna yang berbeda. Semua dokumen telah diotorisasi terlebih dahulu agar tidak terjadi penyimpangan atau

penyelewengan dimasa datang. Rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan atau akuntansi, hal ini memudahkan koperasi dalam mengoreksi jika terjadi kesalahan akan adanya perbedaan saldo koperasi dengan saldo bank. Koperasi telah memiliki struktur organisasi yang baik, dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut maka koperasi telah memisahkan fungsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Memiliki *plafon* atau batasan yang telah ditetapkan koperasi, disesuaikan dengan pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif. Adanya rapat evaluasi yang diadakan setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukan selama sebulan. Hal ini dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang agar lebih baik lagi. Koperasi memiliki pengamanan atas *asset* yang dimiliki koperasi.

Pada dasarnya pengendalian internal dilakukan di koperasi yang memadai akan membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional koperasi, keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan. Sehingga dapat mengamankan harta koperasi dari tindakan kecurangan serta manipulasi yang terjadi di dalam maupun di luar koperasi. Pengendalian internal yang diterapkan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memuat seluruh komponen pokok dari pengendalian internal, yang terdiri dari.

Lingkungan pengendalian yang baik dalam koperasi didukung dengan adanya lingkungan yang memiliki sistem dan prosedur serta struktur yang saling mendukung. Dalam lingkungan pengendalian mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam sistem pemberian kredit. Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut maka diterapkan unsur-unsur: a. Nilai integritas dan etika. Koperasi memiliki suatu buku pedoman

yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, sehingga dapat ditangani secara profesional. Buku pedoman ini dinamakan Buku Pedoman Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Di dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai visi dan misi unit usaha simpan pinjam Koperasi Primer Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dimana visinya yaitu menjadi usaha simpan pinjam yang memiliki reputasi pengelolaan dana terbaik untuk kesejahteraan anggota. Sedangkan misinya yaitu: 1) Menjadi mitra bisnis utama anggota dan calon anggota untuk menciptakan kepuasan dan pelayanan terbaik. 2) Memberikan kinerja terbaik, dengan proses yang sempurna dan penuh komitmen melalui kerjasama yang dilandasi saling percaya dan menghargai satu sama lain. 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan Usaha Simpan Pinjam, Perlindungan Resiko, dan kualitas Sumber Daya Manusia. 4) Mengembangkan Unit Simpan Pinjam yang menerapkan Prinsip Gotong Royong. 5) Mewujudkan Unit Simpan Pinjam yang berhasil baik secara Ekonomi Sosial. Maka dengan visi dan misi tersebut diharapkan para karyawan mengerti tujuan serta pencapaian sehingga akan bekerja dengan baik sesuai prosedur dan kebijakan koperasi untuk mendukung tercapainya visi dan misi koperasi.

Koperasi Primer Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menerapkan integritas dan nilai etika pada seluruh karyawannya, dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh manajemen berupa tata cara kepegawaian mengenai etika dan perilaku.

Aturan-aturan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada setiap karyawan yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Apabila ada karyawan yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka kepada karyawan tersebut akan

dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau surat peringatan. Melalui aturan tersebut, manajemen koperasi telah berusaha untuk mengurangi godaan yang mengakibatkan karyawan bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan tidak etis. Dalam melakukan transaksi kredit, integritas dan nilai etika karyawannya cukup baik. Hal ini terlihat dari kejujuran karyawan dalam pencatatan dan transaksi kredit serta mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan kredit dengan baik dan benar sehingga kredit yang telah diberikan dapat kembali dalam waktu yang telah disepakati bersama antara koperasi dan anggota.

Komitmen terhadap kompetensi Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari setiap karyawan yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Dengan menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan dan latar belakang pendidikan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan untuk menduduki posisi tertentu. Dengan adanya filosofi yang dianut yaitu aman, terarah dan produktif menunjukkan adanya pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian kredit. Beberapa carapun ditetapkan koperasi agar risiko dapat diminimalisir yaitu dengan pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu, penagihan piutang atau kredit yang dilakukan setiap tanggal yang sudah ditetapkan sebelum jatuh tempo sehingga memungkinkan tidak terjadinya kredit macet. Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu agar proses pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak akan menghambat prosedur yang lainnya. Karena pembayaran merupakan aktivitas yang paling utama, dengan adanya pembayaran maka proses siklus keuangan akan berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu jika pembayaran yang dilakukan tidak

tepat waktu akan berdampak tidak baik untuk kelangsungan koperasi.

Penagihan piutang juga harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan selain untuk meminimalkan risiko juga agar para nasabah atau peminjam dapat menepati janji sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penghapusan piutang atau penghapusan pinjaman. Oleh karena itu penagihan pinjaman yang bermasalah akan diproses sesuai dengan kebijakan dan ketetapan koperasi. Untuk menciptakan suasana yang nyaman di koperasi setiap karyawan saling mendukung akan tugasnya masing-masing serta memberikan masukan. Keakraban terjadi bukan hanya sesama karyawan melainkan atasan dengan karyawan pun menjalin hubungan baik. Ini dilakukan agar setiap karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa adanya perselisihan paham diantara karyawan maupun dengan atasan.

Koperasi telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan secara umum bertujuan untuk memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dalam setiap fungsi atau bagian yang ada dalam pencapaian tujuan koperasi. Di dalam struktur organisasi Koperasi Patra belum memiliki bagian khusus untuk menganalisis pinjaman atau kredit, karena sampai saat ini analisis kredit dilakukan oleh manager simpan. Pada umumnya koperasi seharusnya memiliki analisis kredit yang berkepentingan dengan laporan keuangan koperasi untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada peminjam atau anggota atau nasabah. Analisis kredit sangat penting karena dibagian ini yang akan menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Kriteria ini terkait dengan adanya penambahan bagian di struktur organisasi dan komponen monitoring dengan cara mendeteksi secara dini agar tidak terjadi

penyimpangan bahkan sampai terjadinya kredit macet.

Akibat belum adanya analisis kredit adalah manager simpan pinjam tidak terfokus untuk menganalisis permohonan pinjaman nasabah. Inilah yang sering menjadi kendala utama terjadinya kredit macet. Ketua kurang mendalami aspek-aspek yang harus dianalisis, tugas Ketua yang sudah banyak harus dibebani lagi dengan menganalisis kredit. Sehingga penulis memberikan rekomendasi untuk menambahkan bagian analisis kredit di dalam struktur organisasi Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Di koperasi tidak terdapat dewan direksi sehingga kedudukan paling tinggi dalam struktur organisasi pada Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah Rapat Anggota. Karena rapat anggota sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi sebagai sesama pemilik. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan koperasi. Untuk tugas keseharian, pengurus yang menjadi kedudukan paling tinggi karena semua dokumen harus diotorisasi dan disetujui oleh pengurus. Namun ada beberapa dokumen yang memang tidak memerlukan otorisasi dari pengurus.

Pemberian otorisasi merupakan hal yang penting terutama dalam hal menyetujui atau tidaknya sebuah dokumen, hal itu dilakukan agar pengendalian internal dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adanya pemberian otorisasi dan tanggung jawab membuat karyawan menjadi bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya, dengan begitu akan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan seperti kecurangan dalam pembuatan dokumen palsu yang dapat merugikan koperasi. Selain itu, adanya pembagian wewenang serta tanggungjawab secara tertulis maka setiap

karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Risiko selalu ada disetiap koperasi karena ini merupakan suatu masalah yang dapat terjadi dalam koperasi, baik risiko secara internal maupun eksternal. Namun, tentu koperasi mempunyai strategi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengevaluasi risiko-risiko tersebut dengan adanya pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di dalam koperasi, sehingga koperasi tidak akan mengalami risiko yang akan timbul. Untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah kredit sebagai akibat adanya risiko kredit, maka dilakukan penaksiran risiko pada koperasi dilihat dari sudut pandang: Dalam pelaksanaannya masih kurang mengikuti perkembangan sistem informasi baru, karena sistem yang lama masih dianggap sudah cukup. Sistem yang digunakan memang sudah terkomputerisasi yaitu dengan menggunakan sistem DosFoxPro, sistem ini digunakan oleh unit simpan pinjam koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sejalan dengan perekonomian nasional yang keadaannya naik turun, maka diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan diharapkan memberikan prospek usaha yang berguna untuk meningkatkan perekonomian nasional. Mengingat kondisi tersebut, koperasi berusaha melakukan peningkatan penghimpunan dana untuk tercapainya keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui program dan langkah-langkah yang diambil, diantaranya: Meningkatkan *profesionalisme* karyawan, Peningkatan pelayanan kepada anggota.

Koperasi dalam pembuatan laporan dan informasi memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan telah menerapkan perhitungan yang sudah komputerisasi. Hal ini dilakukan agar risiko kesalahan relatif kecil, meskipun masih terdapatnya *human error*. Koperasi senantiasa menjaga konsistensi terhadap kebijakan dan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga

laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi pembanding dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tetap masih adanya beberapa catatan mengenai beberapa hal yang harus diperbaiki, khususnya dalam pengendalian internal. Berdasarkan wawancara dan *observasi*, risiko yang timbul salah satunya disebabkan oleh anggota yang tidak membayar piutang atau pelunasan pinjamannya. Meskipun sudah terdapat prosedur apabila piutang tak tertagih maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa kebijakan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Penghapusan piutang ini tentu harus ada persetujuan dari seluruh pihak terutama para anggota yang memiliki wewenang atas dana-dana tersebut. Dengan kejadian tersebut koperasi selalu melakukan perbaikan atas kesalahan serta kelemahan tersebut, dan koperasi terus melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan dan peraturan yang ada sehingga dapat menghindari risiko yang terjadi. Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Komponen-komponen pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendaliannya yaitu: Pengendalian pemrosesan informasi dimaksudkan untuk kelancaran dalam pengendalian internal, dengan adanya ini maka koperasi dapat mengontrol semua kejadian yang terjadi dalam koperasi. Dari hasil wawancara penulis, didapatkan bahwa koperasi sudah memiliki sistem yang terkomputerisasi, agar dapat memudahkan dalam pengerjaannya sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dikerjakan serta cepat selesai. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menunjang pengendalian internalnya, yaitu: 1. Terdapat *password* jika ingin membuka data-data yang dianggap rahasia. *Password* digunakan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kecurangan data yang berada di dalamnya. *Password* hanya diketahui oleh karyawan yang bertugas menjalankan pemrosesan data tersebut seperti

pada komputer ketua unit simpan pinjam, kasir, dan bagian keuangan. 2. *Review* atas kinerja. Koperasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap karyawannya. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para karyawan yang berguna untuk kemajuan koperasi dimasa yang akan datang, misalnya: 1) Koperasi melakukan evaluasi terhadap seluruh karyawan 2) Evaluasi ini dinilai berdasarkan kinerja karyawan selama satu tahun, daftar absensi, dan masalah-masalah apa saja yang terjadi selama satu tahun serta perbaikan dimasa yang akan datang. Evaluasi juga dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen kredit dan mewajibkan melaporkan tingkat *kolektibilitas* kredit dalam laporan bulanan intern. Evaluasi tersebut diadakan setiap satu tahun sekali dengan melibatkan seluruh karyawan. Informasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik sesama karyawan maupun karyawan dengan atasan. Hal ini diperlukan agar dapat berjalannya suatu kegiatan operasional yang baik dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko dalam hal pemberian pinjaman atau kredit. Informasi dimulai dari *entry* data-data yang berhubungan dengan anggota, pokok simpanan dan pinjaman, tanggal simpanan dan pinjaman, penilaian jaminan dan laporan reputasi anggota. Komunikasi yang dilakukan terhadap anggota dilakukan secara langsung ataupun dengan alat komunikasi melalui telepon.

Berikut ini beberapa pelaksanaan informasi dan komunikasi yang terdapat pada Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat: Adanya buku pedoman, sistem, dan prosedur yang berisikan informasi-informasi yang dapat dikomunikasikan dengan para karyawan maupun jajaran staf lainnya. Buku pedoman diberikan dengan maksud agar karyawan dapat dengan jelas memahami mengenai apa saja yang harus diterapkan serta sanksi-sanksi yang diberikan jika melakukan kesalahan. Karena buku ini dapat menjadi salah satu

pedoman untuk menciptakan komunikasi baik antara sesama karyawan, karyawan dengan anggota, maupun karyawan dengan atasan. Adanya pertemuan yang diadakan setiap satu tahun sekali dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena keberadaan rapat anggota dalam koperasi adalah kekuasaan tertinggi. Sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi karena sesama pemilik. Karena sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan koperasi. Dengan demikian, melalui rapat forum, para anggota akan memiliki peluang untuk turut mengarahkan jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Selain untuk membahas kinerja koperasi selama satu tahun, rapat ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik sesama pelaku yang berkepentingan di dalam koperasi, baik itu pengawas, pengurus, karyawan, dan anggota.

Pemantauan yang dilakukan adalah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam persetujuan kredit baik oleh koperasi maupun oleh anggota, seperti penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan koperasi, manajemen, maupun kegiatan usaha (secara fisik). Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan koperasi maupun anggota. Koperasi secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasi koperasi, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam operasi koperasi, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa hal terkait dengan penerapan pemantauan yang dilakukan dengan baik oleh koperasi, yaitu, pemantauan yang dilakukan oleh pengurus pada dokumen-dokumen yang diotorisasi. Pengurus

memantau dan mengawasi semua dokumen yang di otorisasi yang terkait dan berhubungan dengan koperasi. Tidak hanya dokumen-dokumen saja melainkan semua prosedur, kebijakan, serta sanksi- sanksi yang telah dibuat agar hal tersebut tidak menyimpang. Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan maka sebagai pengurus berhak untuk mengevaluasi data-data tersebut. Inilah tujuan diadakan pemantauan dalam koperasi, agar semuanya berjalan dengan baik. Dari evaluasi tersebut, penulis menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pemantauan, seharusnya tidak hanya pengurus saja yang memantau tetapi seluruh karyawanpun harus melakukannya juga. Namun sebagai manager sudah turut andil dalam proses pemantauan sehingga pemantauan pun akan lebih efektif dan efisien. Pemantauan juga harus dikhususkan pada bagian kasir maupun akuntansi dan keuangan yang mencatat penerimaan kas, menagih pembayaran, serta piutang yang dilakukan oleh nasabah, agar semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga menghindari risiko yang akan terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan, pengendalian intern terhadap piutang Koperasi Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berjalan sesuai dengan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengendalian intern, namun di sisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian intern. 1) Lingkungan pengendalian terhadap piutang Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai salah satunya dengan penerapan SOP (*standard operating procedures*) pada prosedur peminjaman. 2) Penentuan resiko terhadap piutang Primer

Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik karena adanya surat pernyataan yang mengharuskan peminjam wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Koperasi. 3) Aktivitas pengendalian internal terhadap piutang Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan koperasi telah membuat kerangka kerja didalam mengatasi piutang yang ada di koperasi. 4) Informasi dan komunikasi mengenai piutang telah diterapkan cukup baik, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen. 5. Pengawasan atau pemantauan terhadap piutang telah berjalan baik dan efektif, baik pengawasan yang dilakukan oleh pengurus koperasi maupun audit terhadap piutang usaha oleh komite audit. Hal ini juga bisa dilihat pada pemantauan pemberian pinjaman yang tidak hanya pengurus yang melakukan persetujuan pinjaman tetapi Komandan Kesatuan/Kepala Staf juga ikut serta dalam pemberian persetujuan pinjaman.

Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut: 1) Tingkatkan kualitas pengendalian internal piutang anggota agar permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dapat diminimalisasi sekecil mungkin dengan cara melakukan komunikasi dan informasi secara terpusat 2) Primer Koperasi Kepolisian daerah Kalimantan Barat perlu memperhitungkan tingkat perputaran piutang dan rata-rata hari pengumpulan piutang sebelum memberikan piutang sehingga dana yang tertanam dalam piutang tidak mengalami penumpukkan. 3) Pihak koperasi sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada anggota yang melakukan tunggakan yaitu dengan pemberitahuan keanggota yang melakukan tunggakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Boynton dkk (2003). **Modern Auditing. Buku 1 edisi 7.** Alih Bahasa Gina Gania, Ichsan Setyo Budi. Erlangga. Jakarta.
- FKIP Untan. (2013). **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.** Pontianak: Edukasi press FKIP Untan.
- Guy (2002). **Auditing**, Jilid II, Edisi 5, Penerjemah Sugiyarto, Erlangga: Jakarta
- Hadari Nawawi. (2012). **Metode Penelitian Bidang Sosial.** Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Mulyadi (2013). **Auditing.** Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Nugroho Widjajanto .(2013). **Sistem Informasi Akuntansi.** Erlangga: Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/MM. KUKM/IV/2007
- Sudarsono, (2014).**Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.** Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2012). **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2012). **Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI).** Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyanto dan Nurhadi (2013). **IPS Ekonomi,** Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, pusat pembinaan dan Pengembangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.
- Warren dkk (2005). **Pengantar Akuntansi. Buku satu.** Edisi kedua puluh satu. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan. Salemba Empat: Jakarta.